

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam pencapaian kepentingan nasional suatu negara yang merupakan tujuan dari pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, dapat menggunakan diplomasi dalam hal ini adalah menjalin hubungan diplomatik ataupun kerjasama baik itu dalam bidang politik, ekonomi dengan sekutu dekat, misalnya adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa sebagai sekutu dekatnya.

Tujuan politik dan diplomasi adalah identik, keduanya berusaha mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau paling tidak membuatnya bisa saling sesuai, atau keduanya berusaha membuat sebagian kepentingan nasional unggul atas yang lain¹. Sehingga dengan saling memahami kepentingan masing-masing negara dengan lebih baik akan menuju ke arah hubungan diplomatik yang lebih baik juga dan akan mendukung pada penerapan masalah-masalah kepentingan nasional.

Diplomasi telah digambarkan Organski² sebagai “ The Cheapest way of Exercising Power in International Affair” (Cara termurah untuk menguji kekuatan dalam hubungan internasional). Diplomasi telah dipuji karena diplomasi mencoba mencapai tujuan-tujuan maksimal suatu kelompok tanpa perang. Tetapi diplomasi tidak seluruhnya tak cocok untuk perang. Diplomasi

¹ CF. Sterling, *Macropolitics*, hlm.23

sama pentingnya selama perang seperti menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk perang, untuk membantu memenangkan perang dengan membentuk aliansi, menetralkan musuh yang potensial, memecah belah barisan musuh, untuk mengeduk keuntungan sebanyak-banyaknya dari kemenangan perang atau untuk mengurangi kerugian karena kalah perang.

Dalam konsep integrasi didefinisikan sebagai “membentuk bagian-bagian menjadi suatu kesatuan” seperti dalam komunitas pelindung yang menurut Karl W. Deutsch yaitu “suasana dimana masing-masing negara mengharapkan hubungan tanpa kekerasan dan terdapat harapan bersama para negara anggotanya dengan pola interaksi dan rasa timbal balik yang dapat dirasakan atau dengan kata lain, beberapa negara bergabung menjadi satu keseluruhan atau bekerjasama jika merasa diuntungkan. Namun apa yang terjadi hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan sekutu dekat baik sekutu dalam bidang ekonomi, politik maupun militer, misalnya adalah hubungan Amerika Serikat dan Eropa dalam NATO, menjadi memburuk pasca invasi AS ke Irak tahun 2003 yang berdampak pada memburuknya hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa. Jerman dan Perancis yang merupakan sekutu dekat AS malah menolak untuk membantu AS menginvasi Irak secara militer. Belum pernah dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat hubungan antara para sekutu dekatnya memburuk seperti yang terjadi selama pemerintahan Bush³.

³ Kompas “Demokrasi AS dan Implikasinya terhadap Dunia” Minggu, 24 Oktober 2003

Dengan alasan yang terpapar diatas, digunakan sebagai pertimbangan penulis untuk memilih judul: “ **HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN EROPA PASCA INVASI AS KE IRAK TAHUN 2003.**”

B. Penegasan Judul

Dalam skripsi yang berjudul “**HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN EROPA PASCA INVASI AS KE IRAK TAHUN 2003**”, agar tidak terjadi pembahasan yang meluas maka perlu ditetapkan penegasan judul.

Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi negara-negara mana saja yang menjadi sekutu AS dalam melakukan invasi militer ke Irak, diantaranya adalah Polandia, Republik Ceko, Hongaria, Albania, Bulgaria, Kroasia, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Italia, Portugal, Inggris, Denmark, Hungaria, Turki, Jordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Israel, Mesir, Suriah, Malta, Siprus, Yunani, Australia, Korea Selatan. Walaupun invasi militer ke Irak tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya tapi dalam skripsi ini hanya difokuskan pada negara Amerika Serikat sebagai negara yang paling depan menyerukan agar Irak diinvasi secara militer.

Sedangkan yang dimaksud Eropa disini adalah negara Jerman dan Perancis saja meskipun di Eropa tidak hanya terdapat negara Jerman dan Perancis saja yang menentang di invasi militer AS ke Irak diantaranya seperti

negara Jerman dan Perancis saja, sebab kedua negara ini merupakan sekutu dekat AS dan supaya tidak terjadi pembahasan yang meluas.

C. Tujuan Penelitian

Beberapa alasan yang mendasari penelitian skripsi ini, yakni:

1. Maksud dari penulis adalah menjelaskan mengapa hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Eropa pasca invasi AS ke Irak menjadi memburuk, padahal dulu hubungan keduanya adalah merupakan hubungan sekutu yang dekat.
2. Dapat menggali dan lebih mematangkan lagi ilmu yang telah penulis dapatkan dari perkuliahan atau yang telah penulis temukan di dalam horizon pengetahuan dengan inisiatif sendiri, mulai dari bacaan, dan info-info di media massa(baik cetak atau elektronik)
3. Sebagai sebuah syarat (wajib) bagi penulis bila akan lulus atau menyelesaikan program S1 di jurusan Hubungan Internasional di kampus UMY.

D. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat dan Eropa merupakan sekutu dekat atau sekutu tradisional, yang telah lama menjalin hubungan diplomatik, Misalnya hubungan antara AS dengan Jerman. Hubungan baik Jerman dengan AS bisa dibilang sangat dekat sehingga Jerman hampir selalu ada untuk AS dan

mempunyai kendala yang mengganggu persahabatan keduanya. Jerman merasa berhutang budi pada AS atas jasa-jasa AS dalam pembangunan Jerman setelah kalah dan “dipermalukan” di Perang Dunia.

Hubungan antara AS dan Eropa dimulai pasca Perang Dunia II saat Eropa mengalami kekalahan pada Perang Dunia II yaitu pada tahun 1945⁴. Tepatnya pada tanggal 6 September 1946 Menteri Luar negeri AS Byrnes menyatakan perubahan visi sekutu Barat terhadap Jerman yang dahulunya adalah musuh dan pasukan pendudukan menjadi mitra pelindung. Secara perekonomian sejak tahun 1946, Jerman mendapat bantuan dari AS dalam Marshall Plan untuk menanggulangi kelaparan, kemiskinan, keputusasaan dan kekacauan. Kekalahan perang telah membuat Eropa menderita kerugian yang tak ternilai karena itu, pasca Perang Dunia II, Eropa berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kekerasan dengan menguatkan kerjasama multilateral diantara negara-negara di dunia. Keinginan Eropa untuk lepas dari masa lalunya yang penuh darah itu telah menyebabkan perubahan nilai-nilai transnasional mengenai power dan ancaman. Inilah yang membuat Eropa tidak begitu peduli atas kepemilikan perlengkapan militer yang canggih. Tidak mengherankan, secara militer negara-negara Eropa sangat bergantung pada Amerika.

Sementara itu, AS yang saat itu tidak terlibat perang di Eropa, terus meluaskan kekuatannya sehingga muncul menjadi aktor yang *superior* di dunia. Bahkan yang menolong Eropa dari ambang kehancuran adalah AS,

⁴ <http://www.Briefing.com>

yang tidak menderita kerugian apapun akibat perang justru perekonomian AS meningkat.

AS melalui program Marshall Plan-nya membantu memulihkan Eropa yang terpuruk akibat perang yang berkepanjangan. Program bantuan AS itu memang mampu menyelamatkan Eropa dari kehancuran.

Jalinan kerjasama AS dan Perancis sudah berlangsung bertahun-tahun. Mulai forum G-7 sampai Dewan Keamanan PBB. Dikedua forum itu Perancis dan AS sama-sama memiliki suara dan pengaruh yang kuat begitu juga pada koalisi Perancis dan AS pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Hubungan antara AS dan Eropa meningkat ke hubungan Transatlantik yaitu pada terbentuknya NATO yang merupakan aliansi militer yang terdiri dari Amerika, Kanada dan 14 negara Eropa Barat (Perancis, Italia, Jerman, Belgia, Belanda, Luxemburg) yang berdiri pada tanggal 4 April 1949⁵. NATO dibentuk dengan tujuan menyatukan stabilitas di Eropa Barat untuk menanggulangi meluasnya ideologi komunisme. Selain itu bertujuan untuk menjaga perdamaian diantara negara anggotanya. Selama perang Dingin, NATO membantu menjaga perdamaian di Eropa melalui kebijakan deterennya. Tetapi juga mengalami ketidaksepakatan diantara anggotanya, ketidaksepakatan yang utama adalah mengenai senjata nuklir. Contoh terakhir kerjasama yang baik antara keduanya adalah Krisis Ukraina⁶. Hubungan baik antara Eropa dengan AS mengalami ketegangan lantaran sikap Jerman dan Perancis mengenai masalah Irak. Hubungan yang renggang antara AS dan

⁵ *NATO History*, (accessed February 15, 2005); available from [Http://www.realpolitik.US/organization](http://www.realpolitik.US/organization) News.

⁶ *Kompas*, 31 Desember 2004

Eropa mulai terlihat jelas ketika AS berencana menginvasi Irak tanggal 19 Maret 2003 pada pukul 05.35 waktu Bagdad, hanya sekitar 95 menit dari batas akhir ultimatum 48 jam yang ditetapkan oleh AS bagi presiden Irak Saddam Husein karena dianggap telah memiliki senjata pemusnah massal. Inggris, Spanyol, Italia, Belanda dan beberapa negara Eropa Timur secara tegas mendukung rencana presiden Bush, Sementara Jerman, Perancis, Luxemburg dan Belgia menentang rencana AS tersebut. Tindakan Amerika mengenai invasi ke Irak telah mencerminkan menguatnya Unilateralisme dan menurunkan "dimensi Kemamusiaan dan Sosial" dalam kebijakan luar negeri Amerika. Padahal dahulu di masa pemerintahan Bill Clinton kebijakan Amerika tidaklah seagresif dan searogan pemerintahan George W. Bush, sebab di era Bill Clinton dalam mewujudkan tatanan globalnya lebih menggunakan cara yang multipolar, adanya gejala saling keterkaitan antar negara dengan masalah global dibidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, lalu meningkatnya aktor non-pemerintahan dalam tata hubungan antar negara, serta munculnya isu-isu baru dalam agenda politik internasional, seperti HAM, investasi humaniter, demokrasi⁷.

Kebijakan politik luar negeri pemerintahan Bush yang cenderung unilateralisme pada setiap kebijakan luar negerinya yang ditawarkan harus disepakati oleh negara manapun, tidak terkecuali juga DK PBB yang mempunyai otoritas tertinggi dalam mengesahkan sebuah serangan ke negara

⁷ Charles W. Kegley Jr. and Gregory A Raymond, *A Multipolar Peace? Great Power Polttic Since The Twenty First Century*, New York, St. Artin's Press, 1994, p. 78.

(berdaulat) seperti Irak⁸. Dan jika tidak mendapat dukungan dari negara-negara sekutunya atau DK-PBB maka pemerintahan AS akan tetap melaksanakan kebijakannya secara sendiri.

Perang yang dilancarkan AS kepada Irak dimulai⁹. Jalan militer untuk melucuti senjata pemusnah massal rezim Saddam Hussein ditentang di Perancis, Jerman, dan sejumlah negara Uni Eropa yang sejak dulu menjadi "sohib Karib" AS dan Eropa sama-sama menjadi ahli waris yang sah dari abad pencerahan yang memuja kebebasan, otonomi individu dan demokrasi, keras sekali menentang perang¹⁰.

Sebagian besar negara didunia tidak habis pikir mengapa AS memaksa perang ini dilakukan, padahal sebagian besar anggota DK PBB menentang. Tiga dari lima negara anggota tetap DK PBB bersikeras menentang kehendak AS untuk berperang dengan Irak. Negara-negara yang menentang invasi AS ke Irak diantaranya adalah Perancis, Jerman, Belgia dan juga ditentang oleh Sri Paus Johannes Paulus, Nelson Mandela, berbagai organisasi Uni Afrika, Liga Arab dan negara-negara yang punya pengaruh besar di dunia yaitu Cina dan Rusia. Tetapi juga terdapat hampir 30-an negara menawarkan dukungan pada Amerika Serikat untuk memimpin perang melawan Irak¹¹. Dukungan berasal dari negara sekutu AS baik dari negara Uni Eropa maupun non-Uni Eropa. Setiap negara mempunyai alasan sendiri mengapa memilih mendukung

⁸ *Gatra*, 8 Maret 2003

⁹ Analisa yang menarik bagi anda yang ingin mendapatkan deskripsi alasan invasi AS ke Irak, James Luhulima, "Keyakinan Berada di Balik Serangan AS ke Irak", *Kompas*, 23 Maret 2003, hlm.25-32.

¹⁰ Ahmad Sahal, "Berapa Irak dan Dunia Hehehehe Amerika", *TEMPO*, Edisi 24-30 Maret 2003

perang daripada menentang perang. Misalnya, Polandia, Republik Ceko dan Hongaria. Ketiga negara ini mendukung AS sebagai ungkapan terimakasih, karena telah dilepaskan dari belenggu komunisme dan mengharapkan dukungan untuk menjadi anggota NATO. Negara yang mendukung AS untuk menginvasi Irak antara lain; Polandia, Republik Ceko, Hongaria, Albania, Bulgaria, Kroasia, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Italia, Portugal, Inggris, Denmark, Hungaria, Turki, Jordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Israel, Australia, Korea Selatan, Mesir, Suriah, Malta, Siprus, Yunani.

Perancis, Cina, Rusia menganggap memerangi Irak untuk melucuti persenjataan pemusnah massalnya adalah suatu tindakan yang berlebihan karena peluang untuk melucuti persenjataan Irak bisa dilakukan lewat cara damai. Satu-satunya negara tetap DK PBB yang mendukung AS hanya Inggris. Bahkan Jerman yang selama ini dianggap sebagai sekutu dekat AS pun menentang perang terhadap Irak dan bergabung bersama dengan Perancis, Rusia dan Cina dan beberapa anggota DK PBB, menentang kehendak AS untuk memerangi Irak. Sama seperti Perancis, Rusia dan Cina, Jerman pun menegaskan bahwa perang bukanlah jalan yang terbaik untuk melucuti persenjataan Irak¹². Jerman meski bukan anggota tetap DK PBB sangat diharapkan membantu AS dalam kampanye militer melucuti persenjataan Irak. Tetapi bukan malah mendukung, Jerman justru menjadi negara terdepan yang mengatakan "tidak" terhadap aksi militer.

Perancis, Cina dan Rusia yang punya hak veto DK PBB malahan setuju melakukan perang asalkan dengan mandat PBB.

Pasca invasi AS ke Irak tahun 2003 hubungan AS dengan Eropa menjadi bersitegang atau bisa dikatakan memburuk karena adanya invasi AS ke Irak tahun 2003 tersebut berdampak pada memburuknya hubungan transatlantik. Belum pernah dalam sejarah kebijakan luar negeri AS hubungan dengan para sekutu tradisionalnya di Eropa seperti dengan Jerman dan Perancis begitu buruk seperti yang terjadi selama pemerintahan Bush¹³.

Contoh hubungan antara AS dan Eropa yang urang baik pasca invasi AS ke Irak 2003 lalu yaitu batalnya sejumlah pertemuan antara pejabat Departemen Luar Negeri Perancis dengan sejumlah pembantu dekat presiden George W. Bush pada 17 April 2004, yang rencananya dalam pertemuan itu akan dibahas hubungan AS dan Perancis pasca Perang Teluk II. Pembatalan tersebut berkaitan dengan adanya desakan Menteri Pertahanan Donald H. Rumsfeld dan Wakilnya, Paul Wolfowitz, agar dalam pertemuan itu hanya dibahas satu hal yaitu menghukum Perancis atas sikap kerasnya menentang invasi AS dan sekutunya ke Irak. Contoh lain yaitu sekitar akhir April 2003, disaat rezim Saddam sudah terguling Jerman dan perancis beserta Belgia dan Luxemburg (dijuluki "Gang of Four") sepakat untuk membentuk semacam pertahanan bersenjata yang independen dari NATO. Kesepakatan ini membuat AS menjadi berang karena dianggap dapat menjadi embrio aliansi pertahanan yang bisa menyaingi NATO. Menteri Pertahanan AS Donald H. Rumsfeld

mengomentari perkembangan di Eropa itu sebagai momentum kemunculan “New Europe” (Negara-negara pro-AS dan NATO yang merupakan kelompok terbanyak di Eropa) dan “Old Europe” yang sudah ketinggalan zaman (perancis dan kawan-kawan). Pernyataan Rumsfeld yang ofensif itu semakin memanas hubungan transatlantik. Indikasi hubungan AS dan Eropa dapat dilihat dari hal yang kecil misalnya, di Kafetaria Gedung Putih nama menu French Fries (kentang iris yang digoreng) di ubah oleh Perancis menjadi Freedom Fries atas sikapnya menentang invasi AS ke Irak.

E. Pokok Permasalahan

Pada penjabaran masalah diatas, maka penulis berkesimpulan, bahwa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah, **Mengapa Hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa sebagai sekutu dekat pasca invasi AS ke Irak tahun 2003 menjadi memburuk?**

F. Kerangka Dasar Teori

Sebagai Penunjang yang bersifat deskriptif dalam kerangka dasar teori ini dapat digunakan teori dan beberapa konsep yang relevan dengan masalah diatas, yaitu:

1. Konsep Kepentingan nasional

Konsep Kepentingan Nasional untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional tetap penting bagi

setiap usaha untuk menerangkan, menjelaskan, atau untuk membuat deskripsi mengenai perilaku Internasional.

Kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi batasan sebagai berikut:

“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetap merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Maka dari itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan, wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”¹⁴.

Dalam konsep Kepentingan Nasional dijelaskan bahwa kebutuhan yang paling vital bagi suatu negara adalah meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Amerika Serikat mempunyai beberapa kepentingan yaitu menjaga kelangsungan hidupnya, pengakuan dari negara lain bahwa Amerika adalah negara Superpower, dan juga untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi karena dengan menginvasi Irak maka Amerika akan dianggap sebagai negara yang memiliki kekuasaan superpower dibuktikan dengan menginvasi Irak tanpa adanya persetujuan mandat dari DK PBB, juga untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi

¹⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Relations*, p. 100.

Amerika karena Irak merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar. Seperti kita ketahui Irak memiliki cadangan minyak mentah sekitar 112 milyar barel, terbesar kedua setelah Arab Saudi¹⁵. Menurut CNN, Irak kemungkinan masih memiliki deposit minyak lain sebesar 220 milyar barel, serta deposit gas alam sebesar milyar 110 kaki kubik, artinya negara tersebut memiliki 11 persen cadangan minyak dunia dan merupakan salah satu produsen terbesar minyak dunia.

Pencapaian kepentingan nasional suatu negara yang merupakan tujuan dari pelaksanaan politik luar negerinya, dapat menggunakan diplomasi dalam hal ini adalah menjalin hubungan diplomatik dengan sekutu terdekatnya yaitu Eropa.

Saling memahami kepentingan masing-masing negara dengan lebih baik akan menuju ke arah hubungan diplomatik yang lebih baik juga dan akan mendukung pada penerapan masalah-masalah kepentingan nasional. Diplomasi politik dalam pencapaian kepentingan nasional tidak selamanya menunjukkan hasil yang optimal bagi hubungan antar bangsa, maka pemahaman terhadap politik luar negeri negara masing-masing merupakan faktor yang cukup dominan untuk dapat mengatasi kemacetan diplomasi politik.

Konsep ini juga sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku Luar Negeri suatu negara¹⁶. Pemikiran yang dicetuskan oleh Hans J.

¹⁵ *Monthly Report*, (accessed march 10, 2005); Available From [Http://www.CNN.com/Iraqwarreport](http://www.CNN.com/Iraqwarreport)

¹⁶ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas Studi Internasional, 1998, hal. 157

Morgenthau (1904-1980), seorang pendukung terkenal aliran realis dalam hubungan Internasional merupakan pendukung sistematis terhadap premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan berbahaya. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa dibentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain baik melalui teknik paksaan maupun kerjasama¹⁷. Kepentingan nasional suatu bangsa yang tidak hanya sadar akan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan bangsa lain, harus didefinisikan dalam pengertian yang cocok dengan bangsa-bangsa lain itu.

Morgenthau menyamakan kepentingan nasional dengan usaha-usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol tersebut bisa melalui teknik-teknik pemaksaan dan teknik kooperatif¹⁸.

Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara bangsa harus dapat mempertahankan integritas teritorialnya, mempertahankan rezim ekonominya, politiknya yang mungkin saja demokratis, otoriter sosialis atau komunis dan sebagainya,

Dari tujuan-tujuan ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik¹⁹, termasuk aliansi tertentu baik atas dasar politik, ekonomi maupun militer. Sedangkan kepentingan nasional Eropa adalah mempertahankan rezim ekonominya dengan cara menjaga eksistensi mata uang euro karena telah banyak negara yang mengkonversikan mata uangnya ke euro, Contohnya adalah Saddam Husein yang mempelopori penggunaan euro pada tahun 2000, ia meminta ke PBB agar proyek oil for food dibayar melalui euro. Maka, mengalirilah sekitar 26 miliar euro ke escrow account (titipan di bank) Irak di Bank BNP Paribas, New York untuk pembayaran 3,3 miliar barel minyak. Bahkan pada tahun yang sama Irak meminta semua transaksi pembayaran atas penjualan minyaknya senilai US\$ 10 miliar dilakukan dengan mata uang euro tersebut. Iran pun terinspirasi juga beberapa anggota OPEC yang lain untuk melakukan hal yang sama terhadap penjualan minyak senilai US\$ 16 miliar. Apalagi ketika kekayaan Irak yang berada di Bank Perancis, BNP Paribas cabang New York, senilai US\$ 10 miliar juga dikonversikan ke dalam euro. Dan juga menjaga kepentingan ekonominya di Irak menyangkut masalah minyak sebab Perancis dan Jerman mempunyai investasi yang besar di Irak. Menurut CIA, World Fact Book, Perancis mengendalikan lebih 22,5% dan impor Irak yaitu minyak. Total

ketiga terbesar dengan nilai 3,1 milyar dollar Amerika, karena sejak 1996, menurut United Nation, Perancis menjadi mitra terbesar Irak dalam perdagangan, diperkirakan tidak kurang 60 perusahaan Perancis melakukan transaksi perdagangan di Irak dengan nilai 1,5 milyar dollar dibawah oil for food program PBB setiap tahun. Begitupula perusahaan minyak Perancis paling besar, TotalFinaELF telah sukses mencapai kesepakatan untuk mengembangkan lading minyak Majnoon di Irak di bagian barat. Ladang minyak Majnoon diperkirakan mengandung minyak dengan nilai 30 milyar barrel. Selain itu TotalFinaELF juga telah mencapai kesepakatan dengan Irak untuk mengeksplorasi minyak di Nahr Umar. Kedua-duanya, Majnoon dan Nahr Umar diperkirakan mengandung 25% cadangan minyak Irak.

Demikian juga dengan Jerman, Jumlah transaksi perdagangan Jerman dengan Irak sekitar US\$ 350 juta tiap-tiap tahun dan bidang lain sekitar US\$ 1 milyar dilaporkan dijual melalui pihak ketiga. Pada bulan November 2002 perusahaan Jerman menandatangani suatu kontrak senilai US\$ 80 juta untuk 5000 onderdil mobil. Di tahun yang sama yaitu 2002, Daimler Chrysler diberikan lisensi diatas \$ 13 juta sebagai kontrak untuk onderdil dan truk Jerman di Irak.

Invasi AS ke Irak tanggal 19 Maret 2003 tersebut merupakan taktik kebijakan presiden George W. Bush untuk mengalihkan perhatian dengan rencana menggulingkan rezim saddam Hussein dengan melontarkan tuduhan bahwa Irak memiliki senjata nuklir. Untuk memuluskan taktik

Padahal taktik untuk menginvasi Irak itu tidak lain adalah untuk mencapai kepentingan nasional AS yaitu kepentingan ekonomi dan juga politiknya yaitu AS akan menguasai industri minyak Irak agar dapat keluar dari krisis yang ekonomi yang melanda negerinya, disamping itu dapat menguasai dunia Internasional sekaligus. Selain itu penguasaan minyak Irak dibawah kendali AS akan menjadi pukulan bagi negara-negara besar lainnya seperti Rusia, Cina, Perancis dan Jerman. Seperti yang kita ketahui Irak memiliki 11 persen cadangan minyak dunia dan merupakan salah satu produsen terbesar minyak dunia.

Jika AS berhasil dalam menginvasi Irak dan menguasai Irak maka akan menciptakan hegemoni baru AS terhadap seluruh kekuatan berbagai negara di dunia. Karena selama ini hanya negara AS saja yang memiliki basis dan pangkalan militer di hampir setiap negara di dunia, termasuk negara-negara besar dan maju. Sebuah pangkalan militer yang dilengkapi dengan peralatan perang canggih, dapat dengan mudah dipakai untuk menginvasi sebuah negara-negara yang menentang keinginan dan kepentingan politiknya²⁰.

Jadi dalam hal ini tidak ada pemahaman kepentingan masing-masing negara, kepentingan nasional AS dalam invasi ke Irak adalah tetap menjadikan negaranya sebagai negara superpower dengan cara menginvasi Irak demi kepentingan ekonominya AS. Sedangkan Eropa berkaitan dengan mempertahankan kepentingannya yaitu mempertahankan stabilitas

²⁰ Editor, Drs Mohammad Safari dan Drs. H. Muzzamil Yusuf, *Perang Irak-AS, Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya*, Jakarta: COMFEC, 2003, hal. 158.

kepentingan ekonomi, maka dari itu Eropa tidak mau bekerjasama dengan AS untuk menginvasi Irak karena akan merugikan Jerman dan Perancis sendiri. Sebab negara ini yaitu Jerman dan Perancis adalah sponsor utama mata uang Euro, jika Jerman dan Perancis membantu AS untuk menginvasi Irak maka otomatis akan memberi kesempatan bagi Dollar AS untuk mendominasi mata uang Internasional serta jika Jerman dan Perancis membantu menginvasi Irak maka akan memberi kesempatan juga bagi AS untuk menjadi negara superpower sehingga Eropa akan selalu dibawah kendali AS dan Eropa sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan AS. Begitu juga kepentingan investasi di Irak menyebabkan Eropa karena dua negara ini terutama Perancis memiliki investasi terbesar di Irak, begitu juga dengan Jerman yang memiliki investasi di Irak walaupun tidak sebesar Perancis. Konflik kepentingan antara AS dan Eropa tersebut membuat hubungan mereka menjadi renggang atau menjadi kurang begitu baik.

2. Konsep Integrasi

Konsep integrasi akan selalu digunakan untuk menganalisa dan menjawab tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi dan politik antar negara dan antar kawasan.

Integrasi didefinisikan sebagai "membentuk bagian-bagian menjadi satu keseluruhan". Definisi yang paling berpengaruh adalah yang diajukan oleh Karl W. Deutsch, ilmuwan ini mengartikan konsep "integrasi" dengan

dimana masing-masing negara mengharapkan hubungan tanpa kekerasan. Atau dengan kata lain suatu negara tergabung atau memutuskan untuk bekerjasama dengan negara lain jika suatu negara itu diuntungkan dan tidak dirugikan.

Konsep ini dipakai untuk menggambarkan suatu proses menuju atau hasil akhir dari proses penyatuan politik atas unit-unit nasional yang semula terpisah²¹.

Di dalam "security Community" harus memiliki kedewasaan institusional yang cukup dalam menggunakan teknik diplomasi yang diterapkan untuk mengatasi masalah dan krisis. Lebih lanjut kedewasaan itu harus sudah dibarengi dengan keinginan bersama para anggotanya untuk mengatasi perbedaan diantara mereka pada level internasional. Tentu saja harapan bersama para negara anggota harus sudah dibarengi dengan pola interaksi dan rasa timbal balik yang dapat dirasakan. Dan akhirnya negara-negara dalam sebuah security community atau komunitas pelindung harus memiliki persepsi yang sama terhadap ancaman musuh eksternal²².

Dari konsep diatas maka dapat dijadikan acuan, yaitu pada hubungan AS dan Eropa dalam NATO. NATO merupakan aliansi militer yang terdiri dari AS, Kanada dan 14 negara Eropa Barat. Berdiri pada 4

²¹ Mohtar Mas'ood.: *Tingkat Studi Hubungan Internasional Analisa dan Teoristasi*, Pusat antar Universitas Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1989, hal.172.

²² Uraian menarik mengenai parameter konseptual masyarakat pelindung, Lihat Lynn Miller. "The Prospect of Order through Regional Security", dalam Richard A Falk dan Saul H. Mendlovitz (ed)

April 1949²³. NATO dibentuk dengan tujuan menyatukan stabilitas di Eropa Barat untuk menanggulangi meluasnya ideologi komunisme selain itu juga bertujuan untuk menjaga perdamaian diantara negara anggotanya. Di dalam NATO AS memainkan peran yang sangat meningkat dalam aliansi yang menyebabkan tumbuhnya kebencian-kebencian di beberapa bagian Eropa terhadap kebijakan AS misalnya pada NATO koalisi Perancis dan AS pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu pada mulanya cukup baik tetapi secara perlahan Perancis menarik diri dari NATO, ini terjadi karena dari kacamata pejabat pemerintah Perancis yaitu pengaruh AS yang begitu kuat sehingga Perancis merasa tidak sreg karena sebagian besar anggota NATO berasal dari kawasan Eropa Barat. Secara geografis Perancis berada di pusat Eropa Barat, tetapi ketika tiba dalam siapa yang memimpin NATO, faktor ini tidak dijadikan bahan pertimbangan maka AS-lah yang justru menjadi “pemimpin” dari bangsa-bangsa Barat tersebut²⁴. Pembentukan NATO oleh negara-negara Eropa Barat dan AS sebagai respon bersama terhadap ancaman militer Uni Soviet yang merupakan formalisasi dari AS sebagai pembuat keputusan utama dalam struktur keamanan Eropa Barat. NATO didirikan dengan premis sebagai komitmen keamanan Trans-Atlantik AS di Eropa. Dengan demikian, tindakan-tindakan politik luar negeri yang dilakukannya di Eropa selalu didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, dan militernya. Secara konseptual bukanlah strategi NATO yang digunakan

²³ NATO History, (accessed February 15, 2005); available from <http://www.realpolitik.US/organization> News.

²⁴ <http://www.realpolitik.US/organization> News.

dikawasan Eropa melainkan menggunakan strategi AS, selain itu juga, AS dikatakan sebagai pembuat keputusan utama dalam mempertahankan struktur politik serta tetap memperluas keanggotaan NATO dengan memasukkan negara-negara Eropa Timur.

Setelah berakhirnya era Perang Dingin dan runtuhnya komunisme, NATO tidak lagi memiliki musuh bersama. Selain itu, walaupun NATO ikut serta dalam global melawan terorisme, akan tetapi dengan itu tugas militernya tidak otomatis menjadi lebih ringan. Kenyataan pahit lain yang juga harus disadari NATO, setelah serangan teror 11 September 2001, AS yang merupakan kekuatan terbesar, hendak menentukan arah politik NATO, artinya, bagi AS dalam program perang anti terornya AS melakukan invasi ke Irak karena Irak dianggap memiliki senjata pemusnah massal yang berakibat membahayakan perdamaian dan kedamaian dunia termasuk kedamaian anggota NATO.

NATO menggelar sidang khusus di Brussel, membahas konflik Irak. Tema utama sidang yang dihadiri 19 militer Aliansi Pertahanan Atlantik Utara, adalah permintaan AS agar NATO mendukungnya, jika terjadi perang Irak. Tetapi tidak semua anggota NATO mendukung AS untuk menginvasi Irak sebab diantara negara anggota NATO seperti Jerman dan Perancis menentang invasi AS ke Irak sebab Jerman dan Perancis menganggap invasi AS ke Irak tersebut dianggap sebagai suatu tindakan yang berlebihan, karena peluang untuk melucuti persenjataan Irak

dari aliansi negara-negara berdaulat ini adalah, membuat keputusan dengan kesepakatan bersama. Secara mendasar, NATO menarik keputusan berdasarkan konsensus, atau tidak memutuskan sama sekali²⁵.

Walaupun dengan adanya perlawanan Jerman dan Perancis terhadap AS dalam invasi ke Irak, dikhawatirkan akan mengubah pola hubungan antara NATO dan AS mengingat Jerman selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS, sebab dengan semua hutang budi atas pulihnya perekonomian Jerman setelah kehancuran perekonomian pasca Perang Dunia, Jerman seharusnya ikut mendukung anggota NATO tetapi Jerman malah menolak untuk mendukung invasi AS ke Irak. Sebab Jerman menganggap bahwa tindakan AS sebagai anggota NATO yang menginvasi Irak dianggap berlebihan dan dianggap telah mengedepankan tindakan unilateral dan meninggalkan kerjasama multilateral.

Dalam kasus Irak ini logikanya adalah jika Eropa membantu AS menginvasi Irak secara militer maka akan merugikan Eropa sendiri karena hubungan ekonomi antara Eropa dan Irak yang cukup besar akan rusak dan otomatis akan memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menunjukkan sikap unilateral-nya untuk menjadi negara superpower. Sehingga Eropa memutuskan untuk tidak membantu AS menginvasi Irak secara militer padahal hubungan keduanya terintegrasi dalam satu wadah yaitu NATO. Karena Eropa dalam kasus ini merasa dirugikan secara ekonomi jika membantu AS menginvasi Irak secara militer.

²⁵ "Masa Depan NATO. Setelah Perluasan",
Huruf, 1991, hal. 12.

Jadi adanya salah satu pihak yang dirugikan yang tergabung dalam satu wadah yang terintegrasi menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi kurang baik dalam hal ini adalah Eropa dirugikan secara ekonomi karena tindakan AS yang menginvasi Irak secara militer, maka hubungan ekonomi antara Eropa dan Irak secara ekonomi akan rusak, sebab Eropa mempunyai investasi yang besar di Irak. Indikasi memburuknya hubungan AS dan Eropa dalam NATO yaitu AS memerintahkan NATO untuk memerintahkan mengirim tim pelatih untuk aparat keamanan di Irak, NATO setuju mengirim tim pelatih untuk aparat keamanan Irak di dalam wilayah Irak sendiri. Namun, penolakan halus datang dari Perancis, Chirac mengatakan hanya akan mengirim tim untuk melatih aparat Irak di luar Irak. Hal serupa juga diutarakan oleh Jerman.

3. Teori Persepsi

Teori persepsi mengasumsikan bahwa perilaku suatu negara tergantung pada cara pandang negara itu pada suatu objek atau situasi.

Persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Frank dan Edward Weisband, yang menekankan pentingnya citra, berpendapat bahwa “ Cara dua negara saling “melihat” satu sama lain saling menentukan cara mereka berinteraksi”²⁶. Dalam kata lain kerjasama suatu negara dengan negara lain yang sistemik tidak mungkin berkembang diantara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif, dan tidak bermoral.

²⁶ *James M. Fearon, State Interactions: Theoretical Analysis and Theoretical Data Study*

Menurut Ole R. Holsti bahwa reaksi atau tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh cara, melihat, menafsirkan dan menilai lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Persepsi itu selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain, juga mengandung keyakinan dasar yaitu keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya²⁷.

Berdasarkan teori persepsi Holsti tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah domestik maupun masalah politik Internasional dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan negaranya.

Jadi orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Tanggapan seseorang pada situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Persepsi itulah yang menuntun seseorang atau sebuah negara dalam melakukan tindakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp "perception Are Guides to Action"²⁸. Dari penjelasan teori diatas maka dapat diaplikasikan kedalam masalah memburuknya hubungan Amerika Serikat dan Eropa adalah sekutu dekat baik sekutu dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Amerika

²⁷ Ole R. Holsti, *Foreign Policy Formation Viewed Cognitively* dalam Axelrod (ed), *Structure of Decision the Cognitive Maps of Political Elites*, Princeton University Press, Princeton, 1979, hal 19-20.

²⁸ Daniel S. Papp, *Government Formation and Policy Making in the United States*, New York, 1971, hal 100.

Serikat adalah dua karakter yang berbeda karena mereka memang berasal dari dua planet yang berbeda seperti yang dikemukakan oleh Robert Kagan "Americans are From Mars, and Europeans are From Venus"²⁹. Walaupun Amerika dan Eropa berasal dari dua planet yang berbeda tetapi mereka tetap menjalin hubungan atau kerjasama misalnya, hubungan AS dan Eropa dalam NATO yang merupakan aliansi militer yang terdiri dari Amerika, Kanada dan 14 negara Eropa Barat berdiri pada 4 April 1949³⁰.

Dahulu di masa pemerintahan Bill Clinton kebijakan Amerika dalam mewujudkan tatanan globalnya lebih menggunakan cara yang multipolar, adanya gejala saling keterkaitan antar negara dengan masalah global dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, lalu meningkatnya aktor non-pemerintahan dalam tata hubungan antara negara, serta munculnya isu-isu baru dalam agenda politik Internasional, seperti HAM, Investasi humaniter, Demokrasi³¹. Sedangkan kebijakan politik luar negeri pemerintahan Bush yang cenderung menggunakan Unilateralisme pasca kejadian 11 September 2001 yang membuat Bush terdesak untuk menggunakan kebijakan Unilateralisme yaitu menurut paham ini Amerika Serikat harus bertindak secara unilateral dalam bidang kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan-kepentingan baik ekonomi (Seperti upaya Liberalisasi perekonomian ke

²⁹ Robert Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, New York: Knopf, 2003

³⁰ NATO History, (accessed February 15, 2005); available from <http://www.realpolitik.US/organization> News.

³¹ Charles W. Kegley Jr. and Gregory A. Raymond, *A Multipolar Peace? Great Power Politik*

Jepang), Kepentingan politik(seperti dalam penyerangan ke Cina karena melanggar hak-hak manusia) maupun kepentingan militer(memastikan bahwa Irak dilucuti senjata nuklir, biologi dan kimianya secara efektif). Pada pemerintahan Bush ini sangat keras kepala (pada setiap kebijakan luar negerinya yang ditawarkan harus disepakati oleh negara manapun, tidak terkecuali juga DK-PBB yang mempunyai otoritas tertinggi dalam mengesahkan sebuah serangan ke negara(berdaulat) seperti Irak³² .

Kebijakan pemerintah AS untuk menginvasi Irak tahun 2003 tersebut membuat sejumlah negara besar Eropa, seperti Jerman dan Perancis menolak untuk bergabung dengan AS dalam menginvasi Irak. Akibatnya, kasus invasi AS ke Irak tersebut telah menimbulkan kerenggangan hubungan transatlantik yaitu hubungan antara AS dan Eropa. Karena dalam menyelesaikan masalah di Irak tersebut, Amerika dan Eropa memiliki pandangan yang berbeda. Eropa tidak setuju dengan tindakan Amerika yang unilateral dengan melakukan invasi ke Irak tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan (DK) PBB. Eropa mencela sikap AS yang mengesampingkan forum kerja sama multilateral.

Bagi Eropa, semua masalah harus diselesaikan dalam kerangka *International Corperation*. Sedangkan Amerika, sebaliknya, apa pun bisa dilakukan guna merealisasikan kepentingannya. Eropa meyakini bahwa

sebaliknya, apa pun meski itu perang halal dilakukan selama itu ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional negaranya.

Dari kasus tersebut, bisa dilihat bahwa Eropa lebih suka memilih kerjasama Internasional sedangkan Amerika sebaliknya, Unilateralisme. Perbedaan pandangan antara Eropa yang lebih mengedepankan kerjasama multilateral dan Amerika yang lebih mengedepankan tindakan unilateral, telah menyebabkan Eropa dan Amerika belakangan ini sering kali berseberangan sehingga ketegangan hubungan pun terjadi diantara keduanya, karena belum pernah dalam sejarah kebijakan luar negeri AS hubungan dengan para sekutu tradisionalnya di Eropa begitu buruk seperti yang terjadi selama pemerintahan Bush yaitu dengan adanya kasus AS menginvasi Irak³³. Ketegangan yang terjadi diantara keduanya disebabkan karena persepsi atau cara pandang antara AS dan Eropa dalam menyelesaikan masalah berseberangan sehingga kerjasama antara AS dan Eropa secara sistemik tidak berkembang secara baik karena Eropa menganggap AS jahat dan agresif karena tindakannya menginvasi Irak.

G. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini mengambil hipotesa

Memburuknya hubungan Amerika Serikat dan Eropa pasca invasi ke Irak disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara AS dan Eropa ;

- A. Perbedaan persepsi antara Eropa yang lebih suka mengedepankan kerjasama multilateral dan Amerika Serikat yang lebih suka tindakan unilateral dalam kasus Irak ini.
- B. Adanya konflik kepentingan antara AS dan Eropa.

H. Jangkauan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka, perlu ditetapkan jangkauan penulisan. Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi jangkauan yang dimulai saat adanya peristiwa invasi ke Irak 19 Maret 2003 sampai pasca invasi hingga tahun 2004. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika data diperoleh sebelum dasawarsa tahun diatas.

I. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (library research). Oleh karena itu data yang akan diambil adalah data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, majalah serta internet, Data dan bahan penelitian ini dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Setelah dilakukan penyeleksian tahap berikutnya adalah tahap

penganalisaan data yang menggunakan kerangka dasar pemikiran yang diambil.

J. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan alasan pemilihan judul, penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas tentang Amerika Serikat tentang Politik luar negeri AS dalam invasinya ke Irak yaitu meliputi Dasar-dasar Politik Luar Negerinya, Kebijakan PLN, Invasi AS ke Irak

BAB III : Dalam bab ini akan membahas tentang Eropa yaitu Jerman dan Perancis meliputi Politik Luar Negeri Perancis dan Jerman, Penentangan Perancis dan Jerman dalam invasi AS ke Irak, Kepentingan ekonomi Jerman dan Perancis dalam penolakan terhadap invasi AS ke Irak.

BAB IV: Dalam bab ini akan membahas tentang faktor-faktor penyebab memburuknya hubungan diplomatik AS–Eropa pasca invasi AS ke Irak.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan penutup yang berisi penyimpulan dari